



Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat : Melihat Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPPM - KB) Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Kelurahan

Eka Komalasari

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
eka.komalasari@soc.uir.ac.id

Received : September 10, 2020; Accepted : September 23, 2020
DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5970

Abstract

Women's Empowerment, Community and Family Planning Agency in the field of Community Economic Business Development is responsible for implementing the Village Economic Business Program, which is one of the empowerment programs that aims to improve the economy of the community. To develop the Kelurahan Economic Business program, the BPPM - KB is responsible for providing training, counseling and supervision of the implementers in each kelurahan. The problem is that not all kelurahan have succeeded in developing revolving funds and the number of bad loans so that the funds to be channeled back to the community are insufficient so that the community cannot borrow for their business. This is due to the lack of responsibility of the Women's Empowerment, Community and Family Planning Agency in the field of Community Economic Business development in carrying out their duties. This study aims to analyze the performance of women's and family-planning empowerment agencies in implementing community empowerment programs in the city of Pekanbaru (Study of Village Economic Enterprises). Data analysis was carried out qualitatively with data source triangulation techniques with stages of reduction, presentation and withdrawal and verification of data. The results showed that the performance of the Women's Empowerment Agency, Community and Family Planning was not maximal, training, counseling, direction and supervision activities were supposed to be carried out for all kelurahan but were not fulfilled, while the inhibiting factors of performance were the lack of employees who would go to each kelurahan in the city of Pekanbaru.

Key Words : *Organizational Performance, Community Empowerment, Village Economic Enterprises*

Abstrak

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Bidang pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan yang merupakan salah satu program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk mengembangkan program Usaha Ekonomi Kelurahan, BPPM – KB bertanggung jawab memberikan pelatihan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksana yang ada pada masing – masing kelurahan. Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua kelurahan berhasil dalam mengembangkan dana bergulir dan banyaknya kredit yang macet sehingga dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat tidak mencukupi sehingga masyarakat tidak dapat melakukan peminjaman untuk usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya tanggungjawab dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Bidang pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat keluarga - berencana dalam

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru (Studi Usaha Ekonomi Kelurahan). Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan teknik triangulasi sumber data dengan tahapan reduksi, penyajian dan penarikan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana yang diukur melalui indikator inputs, outputs dan outcomes belum maksimal, kegiatan pelatihan, penyuluhan, pengarahan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk semua kelurahan namun tidak terpenuhi, adapun faktor penghambat dari kinerja adalah kurangnya jumlah pegawai yang akan turun ke setiap kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru serta kurangnya komunikasi yang terjalin.

Key Words : Kinerja Organisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi Kelurahan

Pendahuluan

Kinerja Organisasi menjadi penting untuk diukur karena akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kedepannya, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, salah satu program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab organisasi ini adalah program Usaha Ekonomi Kelurahan yang merupakan usaha yang dilaksanakan merujuk kepada kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2005 berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa / Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005.

Di Kota Pekanbaru program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 dengan memberikan bantuan dana bergulir sebesar Rp. 500.000.000 kepada masing – masing kelurahan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulannya. Dana yang diberikan kepada

masing – masing kelurahan ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat berkembang dan mampu memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yogia (2016) mengenai Implementasi program pemberdayaan masyarakat ditemukan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak mampu mengembangkan usaha tersebut dikarenakan tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Keluarga – Berencana.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan judul faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ditemukan bahwa faktor sumberdaya manusia menjadi yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam petunjuk pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan program ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Keluarga Berencana (BPPM-KB) bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam Sub Bidang

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Untuk mengembangkan program Usaha Ekonomi Kelurahan, BPPM – KB bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksana yang ada pada masing – masing kelurahan. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalan Usaha Ekonomi Kelurahan, penyuluhan diberikan kepada masyarakat yang menjadi pemanfaat program pemberdayaan dan pengawasan dilakukan untuk pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa tidak semua kelurahan mampu untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Kelurahan tersebut yang dilihat dari banyaknya tunggakan masyarakat sehingga menyebabkan modal yang akan dipinjamkan kembali kepada masyarakat menjadi berkurang.

Tinjauan Pustaka

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006 :25). Kinerja adalah sekinerjagkat keluaran (outcome) yang dihasilkan oleh pelaksanaan fungsi tertentu selama kurun waktu tertentu (Tangkilisan, 2003 : 109).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi,

misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam artian kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu. Pengertian kinerja menurut beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut :

Menurut Keban (2004) kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk rasa” atau “prestasi”. Pencapaian hasil (kinerja) dapat dinilai menurut pelaku yaitu:

1. Kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
2. Kinerja kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
3. Kinerja organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi.
4. Kinerja program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut.

Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Keluarga – Berencana dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan

masyarakat (studi Usaha Ekonomi Kelurahan)

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan (Mangkunegara 2009 : 33) yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen – elemen indikator berikut ini :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif hanya meneliti data yang berbentuk kata-kata dan biasanya merupakan proses yang berlangsung lama.

Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Keluarga – Berencana dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (Studi Usaha Ekonomi Kelurahan). Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik snowball sampling

Hasil dan Pembahasan

Menilai kinerja dari sebuah organisasi dapat dilakukan dengan melihat bagaimana organisasi tersebut menjalankan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dilakukan untuk melihat salah satu tanggungjawabnya dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan, adapun tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah memberikan pengarahan, pelatihan, penyuluhan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing Usaha Ekonomi Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Indikator masukan (*input*)

Input yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu mencapai tujuannya yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya. Program pemberdayaan masyarakat dibawah oleh bidang pengembangan UEM, bidang ini bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan, pelatihan dan penyuluhan, kepada pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan dan Masyarakat pemanfaat program. Adapun tujuan organisasi dalam penelitian ini adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Ekonomi Kelurahan. Kota Pekanbaru terdapat lima puluh delapan (58) kelurahan yang masing - masingkelurahan memiliki Usaha Ekonomi Kelurahan, tugas dari Dinas BPPM-KB ini adalah memberikan pengarahan, penyuluhan dan

pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Kelurahan, selain itu BPPM – KB juga bertanggung jawab terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan dana bergulir yang ada dipinjamkan oleh Usaha Ekonomi Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat pemanfaat dana bergulir dari Usaha Ekonomi Kelurahan Sidomulyo Barat, tidak ada pengarahan, pelatihan, penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPPM - KB terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, mereka meminjam dana dari Usaha Ekonomi Kelurahan untuk menambah modal usaha di bidang perdagangan.

“saya meminjam uang dari kelurahan (Usaha Ekonomi Kelurahan) untuk menambah modal jualan, selama ini tidak pernah ada yang datang kewarung saya, pihak kelurahan ataupun dari dinas “ (Hasil wawancara dengan masyarakat, 11 Agustus 2018)

Menurut pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan, selama ini BPPM – KB belum ada mendatangi mereka untuk memberikan pengarahan, pelatihan, penyuluhan maupun pengawasan, BPPM – KB hanya datang pada saat peresmian Usaha Ekonomi Kelurahan pada saat awal berdiri dan pada saat melakukan evaluasi keuangan.

“BPPM – KB seharusnya melakukan pelatihan kepada pengelola, karena beberapa pengelola tidak memiliki latar belakang yang sama dengan pekerjaannya, permasalahan yang kami hadapi adalah mengenai sistem akuntansi “ (Hasil wawancara dengan pengelola UEK Tanah Berlian, 20 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengelola Usaha

Ekonomi Kelurahan diketahui bahwa BPPM – KB tidak ada memberikan pengarahan pelatihan, penyuluhan dan pengawasan kepada pengelola, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun untuk menangani permasalahan kredit macet.

Indikator keluaran (*outputs*)

Yang dimaksud *outputs* dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik atau dengan membandingkan apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Adapun dalam program pemberdayaan masyarakat, outputnya adalah meningkatnya kemampuan pengelola dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yaitu dalam mengelola Usaha Ekonomi Kelurahan sehingga perputaran modal usaha dapat berjalan dengan baik dan jumlahnya semakin meningkat dan dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat yang membutuhkan. Output ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan pelatihan, penyuluhan, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan program pemberdayaan masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat diketahui bahwa tidak semua

kelurahan dapat dikunjungi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“ Kegiatan pelatihan, penyuluhan, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan masing – masing UEK yang ada di Kota Pekanbaru memang sudah menjadi agenda kami, namun karena keterbatasan waktu dan tenaga akhirnya kami tidak dapat berkunjung ke semua kelurahan, beberapa kelurahan ada kami kunjungi “ (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bagian Pengembangan UEM, 22 Agustus 2018)

“ Kesini belum ada, pihak BPPM – KB belum ada memberikan kami pelatihan, jadinya ya kami bekerja apa adanya aja, petunjuknya ada, Cuma kami kurang memahami secara baik bagaimana mengelola keuangan terutama kalau ada yang tidak lancar membayar “ (Hasil Wawancara dengan pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan, 19 Agustus 2018)

Indikator hasil (*outcomes*)

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Outcomes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan dari bidang Usaha Ekonomi Masyarakat adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Kinerja BPPM – KB dalam hal outcomes dapat dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang meminjam

modal dan kelancaran pembayaran kredit oleh masyarakat tersebut, banyaknya jumlah masyarakat yang meminjam modal untuk usaha ataupun pengembangan usaha menunjukkan keinginan masyarakat untuk mau merubah keadaan perekonomian mereka dan kelancaran pembayaran cicilan menunjukkan usaha mereka berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Kinerja BPPM – KB Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Usaha Ekonomi Kelurahan)

Pencapaian kinerja yang tidak maksimal pada BPPM – KB dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

Faktor Sumberdaya

Setiap organisasi dituntut untuk menampilkan kinerja yang prima dalam berbagai bidang, didalam sebuah organisasi pasti terdapat sumber daya manusia yang memiliki peran sebagai unsur pelaksana atau penggerak dari suatu organisasi. Apabila tidak ada sumber daya manusia dalam organisasi maka hanya menjadi suatu kata saja tidak ada suatu kegiatan di dalam kehidupan nyata. Sumber daya manusia menjadi suatu kendala yang sering dihadapi setiap organisasi, karena tidak semua sumber daya manusia dapat selamanya melaksanakan suatu tugasnya dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi suatu kinerja organisasi dalam memperoleh hasil yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Sumberdaya sangat penting dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya *financial*, jumlah sumberdaya manusia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan tidak

mencukupi dan tidak memiliki kompetensi yang baik untuk dapat memberikan pelatihan, pengarah, penyuluhan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan di masing – masing kelurahan sehingga tidak semua kelurahan dapat terkontrol dengan baik.

Faktor Komunikasi

Komunikasi antara BPPM – KB dengan Usaha Ekonomi Kelurahan tidak berjalan dengan baik, pada saat Usaha Ekonomi Kelurahan tidak berjalan dengan baik, pihak dari kelurahan tidak mencoba untuk menghubungi BPPM – KB sebagai penanggung jawab kegiatan pemberdayaan sehingga informasi – informasi penting yang seharusnya diketahui oleh BPPM – KB tidak tersampaikan.

Kesimpulan

Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang diukur dari indikator Inputs, Outputs dan Outcomes belum maksimal, dari indikator Inputs, permasalahan kekurangan Sumberdaya Manusia untuk menjalankan kegiatan menjadi faktor utama tidak tercapainya rencana yang telah ditetapkan, dari indikator Outputs, kinerja dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana juga tidak baik kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan tidak dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian dari indikator Outcomes yaitu hasil akhir yang diinginkan yaitu berkembangnya Usaha Ekonomi Kelurahan juga tidak tercapai, masih ada beberapa kelurahan yang tidak mampu mengembangkan usahanya, hal

ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Faktor penghambat dalam melaksanakan program pemberdayaan ini adalah kurangnya sumberdaya manusia yang akan melakukan pelatihan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Usaha Ekonomi Kelurahan dan kurangnya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak..

Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistiyani Rosidah. (2009) Manajemen Sumber Daya Manusia konsep, Teori dan pengembangan dalam konteks organisasi Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Dwiyanto. 1995. Konsep Kinerja Organisasi Publik, Jakarta, Jaya Abadi.
- Gunawan Sumodiningrat., 1997., Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat., Bina Rena Parawira., Jakarta.
- Ginanjart Kartasasmita., 1997.,Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat., Makalah disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur., Surabaya.
- Hikmat H. 2006.,StrategiPemberdayaanMasyarakat., Humaniora., Bandung.
- Moleong Lexy., 2002., Metodologi Penelitian Kualitatif., PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Nugroho, D. Riant, 2003, kebijakan publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi),Cetakan 2, Gramedia, Jakarta.

- Safi'i., 2009.,Manajemen Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi., Averroes Press., Malang.
- Santoro Solichin Abdul Wahab., 2012.,AnalisisKebijakanPublik : Dari FormulasikePenyusunan Model-model ImplementasiKebijakanPublik., BumiAksara., Jakarta.
- Sujianto., 2009., Pemberdayaanmenuju Masyarakat Mandiri., Alaf Riau., Pekanbaru.
- Sumaryadi Nyoman., 2005., Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat., Penerbit Citra Utama., Jakarta.
- Tachjan., 2006., Implementasi Kebijakan Publik., Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad., Bandung.
- Usman Sunyoto., 2004., Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat., Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Wirawana. 2001. Kriteria Menilai Kinerja Organisasi Pelayanan Publik . Bandung,Joyo Wisesa.

Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru, Laporan Penelitian LP UIR

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arlisa., 2015., Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK - SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ., Jom Fisip Vol. 2 No. 2
- Komalasari, Eka (2017), Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Laporan Penelitian LPPM UIR
- Syamsidar, 2015, Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Desa gabung makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Jom Fisip Vol. 3 No. 1
- Yogia, Moris Adidi, 2016, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui